

No	Peneliti/Penulis	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Fokus studi yang dilakukan sebagai unsur kebaruan
1.	Suteki, (Disertasi UNDIP, Semarang, 17 Mei 2008)	Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik Hukum Nasional tentang HMN atas SDA yang diduga telah mengingkari nilai keadilan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945; 2. Privatisasi Pengelolaan SDA membahayakan akses rakyat terhadap air; 3. Rekonstruksi politik hukum HMN atas SDA yang berbasis nilai keadilan sosial. 	<p>Penelitian Rekonstruksi HMN atas SDA ini memiliki karakter yang mengedepankan objek penelitian terhadap SDA yang merupakan hak rakyat yang terancam dikuasai oleh pengusaha asing melalui privatisasi sehingga memunculkan ketidakadilan di dalam masyarakat, paradigmanya Konstruksifisme dimana disertasi ini juga menggunakan paradigma kritikal sebagai entry poinnya, sedangkan Penelitian saya menitikberatkan kepada fokus penelitian terhadap hak rakyat atas energi nasional khususnya BBM yang dewasa ini cenderung semakin mahal harganya, di sisni yang menjadi obyeknya yaitu Regulasi Harga Keekonomian BBM yang diduga cenderung masih dipengaruhi oleh konsep kapitalisme dan liberalism sesuai mekanisme di pasar bebas, sehingga cenderung sulit menjamin hak rakyat atas energy seperti yang digariskan oleh konstitusi dan UU No.30 tahun 2007 tentang energi, yang mana untuk menemukan bukti tersebut peneliti menggunakan paradigma Post-Positivisme.</p>

2.	FX. Adji Samekto, (Disertasi, Undip, Semarang, 2003)	Keterkaitan Kapitalisme Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Implementasi Konvensi Keaneka Ragaman Hayati Dalam Kajian Studi Kritis (Critical Legal Studies)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterkaitan antara kapitalisme sebagai konsep dan perilaku Negara-negara Barat (Negara-negara Utara) dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan konvensi keaneka ragaman hayati ; 2. Kepentingan Kapitalisme dan konsep pembangunan berkelanjutan diintegrasikan dalam implementasi konvensi keaneka ragaman hayati; 3. Tindakan yuridis yang dapat ditawarkan kepada Negara-negara Dunia ketiga pemilik sumber daya hayati untuk mencegah dominasi kepentingan kapitalisme dalam implementasi konvensi keanekaragaman hayati. 	<p>Dalam Disertasi ini ada dugaan bahwa implementasi konsep pembangunan berkelanjutan memuat tujuan-tujuan tersembunyi demi kepentingan pertumbuhan ekonomi kapitalis, yang dikhawatirkan dapat menumbuhkan imperialisme Negara maju terhadap Negara berkembang di bidang lingkungan, dan untuk menemukan kebenaran atas dugaan itu Disertasi tersebut menggunakan paradigma <i>Critical Legal Studies</i>.</p> <p>Sedangkan dalam Penelitian yang penulis sedang lakukan tentang Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional dalam Menjaga Hak Rakyat (Studi Regulasi Harga Keekonomian BBM) ini menitik beratkan pengaruh konsep perdagangan bebas terhadap regulasi energy nasional yang cenderung sulit dipertahankan di era globalisasi sekarang ini yang mana untuk menemukan bukti tersebut peneliti menggunakan paradigma Post-Positivisme.</p>
----	--	---	--	---

3	Heryandi, (Disertasi UNDIP, Semarang, 2011)	Aspek Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai (Internasional, Nasional dan Daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi di lepas pantai, baik yang diatur dalam ketentuan nasional maupun internasional, 2. kaitannya dengan otonomi daerah masih diketemukan beberapa masalah, seperti peraturan yang disharmoni antara satu sama lain, adanya ketentuan yang belum dirasakan adil oleh daerah dan lain sebagainya. 3. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang demikian banyak seharusnya satu sama lain saling berhubungan, berkesesuaian dan berkeadilan 	<p>Disertasi tersebut berusaha menemukan solusi agar dibangun konsep pengaturan baru yang lebih harmonis dan terpadu, hal ini muaranya yaitu agar tujuan pengelolaan minyak dan gas bumi, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-UUDNRI 1945, sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat terwujud.</p> <p>Sedangkan di dalam Penelitian yang sedang penulis lakukan ini menitikberatkan kepada pengelolaan kegiatan usaha hilir BBM yang terkait langsung dengan penentuan regulasi harga keekonomian energy BBM tersebut, jadi kajian penelitian ini diluar wilayah pengaturan pertambangan migas seperti dilakukan oleh peneliti sebelumnya.</p>
---	---	--	---	---

